**KEKUATAN LINGKUNGAN DAN POLITIK**

Setiap negara memiliki permasalahan yang kompleks. Mereka harus bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan baik.Salah satu masalah kompleks tersebut adalah mengenai permintaan masyarakat akan kebutuhan yang mereka inginkan yang tidak sesuai dengan persediaan yang ada di negara/wilayah negara tersebut.Mereka harus mencari cara agar kebutuhan mereka dapat terpenuhi dan dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat dan penduduknya.Salah satunya adalah dengan melakukan kerjasama dengan negara lain melalui perdagangan internasional atau bisnis. internasional.

Disini penulis akan mengangkat permasalahan tentang kekuatan politik dalam bisnis internasional dalam suatu negara yang membuat negara dapat melakukan monopoli ataupun dimonopoli oleh negara lain.Bisnis internasional memang mempunyai pengaruh besar pada perubahan suatu negara.Dengan bisnis internasional suatu negara dapat mengetahui apakah negara mereka termasuk negara berkembang ataukah negara maju.  
Sebenarnya bisnis internasional ini muncul sejak tahun 1600 M yang diawali oleh pedagang-pedagang Venesia dan Yunani yang mengirim wakil-wakilnya keluar negri untuk menjual barang-barang mereka.Setelah itu bisnis internasional semakin berkembang di dunia barat dan timur dengan kebijakan dan perjanjian masing-masing negara yang sesuai dengan hukum dan budaya mereka.Bisnis ini kemudian menjadi sarana penting bagi negara-negara tersebut untuk berkompetisi dengan negara lain agar mereka bisa menjual produk unggulan mereka agar laku di pasaran.

**PENGERTIAN HUKUM, TEKNOLOGI DAN POLITIK**

Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak dari orang yang satu dapat menyesuaikan dengan kehendak bebas dari orang lain memenuhi peraturan hukum tentang Kemerdekaan.

E. Utrecht, menyebutkan: hukum adalah himpunan petunjuk hidup –perintah dan larangan– yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa itu.

J.T.C. Sumorangkir, S.H. dan Woerjo Sastropranoto, S.H. bahwa hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman.

Kartini Kartono : Bahwa politik dapat diartikan sebagai aktivitas perilaku atau proses yg menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yg sah berlaku di tengah masyarakat.

Rod Hague : Politik adalah kegiatan yg menygkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yg bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya.

Andrew Heywood : Politik adalah kegiatan suatu bangsa yg bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yg mengatur kehidupannya, yg berarti tidak dapat terlepas dari gejala komflik dan kerjasama.

Teknologi Informasi (TI) telah mengubah wajah ekonomi konvensional yang lambat dan mengandalkan interaksi sumber daya fisik secara lokal menjadi ekonomi digital yang serba cepat dan mengandalkan interaksi sumber daya informasi secara global. Peran Internet tidak bisa dipungkiri dalam hal penyediaan informasi global ini sehingga dalam derajat tertentu, TI disamaratakan dengan Internet. Internet sendiri memang fenomenal kemunculannya sebagai salah satu tiang pancang penanda kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Internet menghilangkan semua batas-batas fisik yang memisahkan manusia dan menyatukannya dalam dunia baru, yaitu dunia “maya”. Setara dengan perkembangan perangkat keras komputer, khususnya mikro-prosesor, dan infrastruktur komunikasi, TI di internet berkembang dengan kecepatan yang sukar dibayangkan. Konsep perdagangan elektronik melalui internet, yang dikenal dengan nama e-Commerce yang lahir karena perkawinan TI dengan globalisasi ekonomi belum lagi genap berusia lima tahun dikenal –dari fakta bahwa sebenarnya sudah ada sekitar 20 tahun yang lalu—ketika sudah harus merelakan dirinya digilas dengan konsepsi e-Business yang lebih canggih. Jika e-Commerce “hanya” memungkinkan seseorang bertransaksi jual beli melalui internet dan melakukan pembayaran dengan kartu kreditnya secara on-line, atau memungkinkan seorang ibu rumah tangga memprogram lemari-esnya untuk melakukan pemesanan saribuah secara otomatis jika stok yang disimpan di kulkas itu habis dan membayar berbagai tagihan rumah tangganya melalui instruksi pada bank yang dikirim dengan menekan beberapa tombol pada telepon genggamnya, maka dengan e-Business, transaksi ekspor impor antar negara lengkap dengan pembukaan LC dan model cicilan pembayarannya juga bisa dilakukan dengan wahana dan media yang sama.

Karena itu, wajar jika pemerintah negara-negara Asia, negara yang dianggap kurang maju, kini mulai secara resmi mendukung perkembangan TI setelah sekian lama diam-kebingungan karena tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan perkembangan teknologi yang demikian cepat ini. Bagi Asia, yang saat ini sedang bekerja keras mengejar ketinggalan dari negara-negara maju dan pada saat yang sama mengalami perubahan sosial politik, keberadaan internet khususnya merupakan masalah yang pelik. Lebih buruk lagi, krisis ekonomi yang dialami Asia pada akhir tahun 90an menunda perkembangan TI di saat AS dan negara-negara Eropa sedang berkembang pesat dalam penggunaan teknologi itu.

Pertemuan Asian Regional Conference of the Global Information Infrastructure Commission (GIIC) di Manila pada bulan Juli 2000 menghasilkan rencana untuk membangun jaringan komunikasi, menyediakan perangkat pengakses informasi dari internet untuk masyarakat, menyusun framework penggunaan TI, membangun jaringan online-pemerintah, serta mengembangkan pendidikan untuk meningkatkan daya saing Asia. Namun memang masih ada hambatan, terutama antara lain sumber daya yang terbatas, masih kakunya sistem pemerintahan, serta perbedaan sosial politik di antara negara-negara yang kini harus bekerjasama –yang bila gagal diatasi, akan tetap menempatkan Asia di pihak yang merugi. Salah satu tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah Asia yang disepakati dalam pertemuan GIIC itu adalah mempersiapkan hukum mengenai transaksi, kejahatan internet, merek dagang, hak cipta dan masalah lain.

LINGKUNGAN HUKUM

Suatu perusahaan dalam negeri harus mengikuti hukum dan kebiasaan negara asalnya. Bisnis internasional menghadapi tugas yang lebih rumit: perusahaan itu harus menaati bukan hanya undang-undang negaranya sendiri tetapi juga undang-undang semua negara tujuan tempat beroperasinya. Hukum negara asal maupun hukum negara tujuan dapat sangat mempengaruhi cara perusahaan-perusahaan internasional menjalankan bisnisnya.

A. Perbedaan dalam Sistem hokum

Sistem hukum nasional sangat berbeda-beda karena alasan-alasan sejarah, budaya, politik, dan agama. Tatanan hukum, peran pengacara, beban pembuktian, hak atas peninjauan kembali, dan tentu saja undang-undang itu sendiri berbeda-beda dari negara ke Negara.

* Hukum Anglo-Saxon (common law) adalah fondasi sistem hukum di inggris dan bekas koloni-koloninya, termaksud amerika serikat, kanada, australia, india, selandia baru, barbados, saint kitts dan nevis, dan malaysia. Hukum anglo-saxon didasarkan pada kebijakan kumulatif putusan-putusan para hakim tentang masing-masing perkara sepanjang sejarah.
* Hukum Kontinental (civil law), didasarkan pada suatu kodifikasi atau daftar lengkap tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Sistem hukum kontinental berasal dari zaman alkitab dengan bangsa Romawi, yang menyebarkannya ke seluruh dunia barat.
* Hukum Agama, didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diciptakan secara resmi yang mengatur iman dan praktik suatu agama tertentu. Suatu negara yang menerapkan hukum agama untuk tindakan perdata dan pidana disebut sebagai teokrasi. Di iran misalnya, sekelompok mullah atau orang suci menentukan keabsahan dan ketidakabsahan menurut hukum melalui penafsiran Al-Quran, kitab suci islam.

B. Hukum yang Berorientasi ke Dalam Negeri

Hukum negara tempat-tempat bisnis internasional dijalankan memegang peran utama dalam menciptakan peluang-peluang yang tersedia bagi perusahaan tersebut. Beberapa di antara hukum ini terutama dirancang untuk mengatur lingkungan ekonomi dalam negeri. Hukum seperti itu mempengaruhi segala segi usaha dalam negeri suatu perusahaan: pengelolaan tenaga kerjanya (undang-undang rekrutmen, kompensasi, dan hubungan tenaga kerja); pembiayaan usaha-usahanya (undang-undang surat berharga, perbankan, kredit); pemasaran produk-produknya (undang-undang periklanan, distribusi dan perlindungan konsumen); dan pengembangan serta penggunaan teknologi (undang-undang paten, hak cipta, dan merek dagang).

C. Hukum Langsung Mempengaruhi Transaksi Bisnis

Undang-undang nasional lainnya secara eksplisit dirancang untuk mengatur aktivitas-aktivitas bisnis internasional. Undang-undang semacam itu sering secara politis dimotivasi dan dirancang untuk mendukung kebijakan luar negeri atau tujuan-tujuan militer negara tersebut. Suatu negara mungkin akan berupaya mengajak negara kedua untuk mengubah kebijakan yang tidak diinginkan dengan menerapkan sanksi larangan perdagangan dengan negara tersebut

.  
D. Hukum yang Ditujukan  ke Perusahaan-perusahaan Asing

Dalam kesempatan lain, negara-negara mungkin akan mensahkan undang-undang yang secara eksplisit ditujukan bagi perusahaan-perusahaan milik asing. Persoalan-persoalan kepemilikan menjadi suatu bidang perhatian khusus. Dalam kebanyakan negara terdapat perdebatan terus menerus antara sayap kiri dan kanan politik tentang keseimbangan yang tepat antara pengendalian pemerintah terhadap ekonomi dan ketergantungan pada kekuatan-kekuatan pasar untuk mengalokasikan sumber daya.

E. Dampak Perusahaan Multinasional terhadap Negara Tujuan  
Perusahaan yang mendirikan pengoperasiannya diluar perbatasan negara asalnya mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan politik, ekonomi, sosial, dan budaya negara tujuan tempat perusahaan tersebut menjalankan usahanya. Untuk bersaing dengan efektif dalam pasar ini dan mempertahankan hubungan yang produktif dengan pemerintah negara tujuan tadi, manajer-manajer perusahaan multinasional harus mengetahui bagaimana mereka dan perusahaannya seharusnya berinteraksi dengan lingkungan nasional dan lokal.

* Dampak Ekonomi dan Politik. Perusahaan-perusahaan multinasional mempengaruhi setiap perekonomian lokal dimana perusahaan tersebut bersaing dan beroperasi. Banyak diantara dampak tersebut bersifat positif.
* Dampak Budaya. Perusahaan-perusahaan multinasional juga dapat mempunyai pengaruh besar terhadap budaya yang menjadi tempatnya beroperasi. Ketika perusahaan ini menaikkan standar hidup lokal dan memperkenalkan produk dan jasa baru yang sebelumnya tidak tersedia, masyarakan dalam budaya negara tujuan tersebut mengembangkan norma, standar, dan perilaku yang baru.

F. Penyelesaian Sengketa dalam Bisnis Internasional

Banyak kontrak bisnis internasional menetapkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini untuk mengurangi ketidakpastian dan biaya dalam menyelesaikan sengketa. Pengadilan kebanyakan negara perdagangan besar akan menghormati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan kontrak ini, sejauh hal itu tidak bertentangan dengan aspek-aspek lain kebijakan publik negara tersebut.  
Agar prinsip tersebut berlaku, negara-negara umumnya menuntut tiga persyaratan dipenuhi:

1. Timbal balik antara negara-negara, yaitu negara A dan negara B bersama-sama menyetujui untuk menghargai keputusan masing-masing pengadilan.
2. Tergugat diberi pemberitahuan yang jelas.
3. Keputusan pengadilan asing tidak menyimpang dari undang-undang domestik atau traktat.

KEKUATAN HUKUM INTERNSIONAL

1. PENGERTIAN HUKUM

Pada dasarnya setiap kegiatan atau aktifitas manusia perlu diatur oleh instrumen yang disebut sebagai hukum. Lembaga hukum adalah salah satu di antara lembaga-lembaga atau pranata-pranata sosial, seperti juga halnya keluarga, agama , ekonomi, perang dan lainnya.

1. APA ITU HUKUM INTERNASIONAL?

Setiap Negara yang berdaulat bertanggungjawab untuk menciptakan dan menegakan hukum didalam yurisdiksinya.Ketika hukum harus melewati batas internasional,penerapannya akan menjadi rumit karena perlu perjanjian antarnegara.Konsep yang berlaku pada hukum domestic belum tentuberlaku padu hukum internasional.

* Hukum internasional sector public mencakup hubungan antarpemerintah,termasuk hukum yang mengatur hubungan diplomatic antar Negara dan semua hal terkait dengan hak dan kewajiban dari Negara-negara yang berdaulat.
* Hukum internasional sector swasta mencakup hukum yang mengatur transaksi individu dan perusahaan yang melampaui batas internasioanal.Contohnya,hukum internasionalsektor swasta akan mengatur permasalahan dalam kontrak antar bisnis di dua Negara berbeda.

1. ATURAN HUKUM

Saat kita membahas mengenai Negara-negara di seluruh dunia,sangant penting untuk menentukan apakah Negara itu di jalankan sesuai hukum,Sebuah Negara perlu menjalankan fungsi-fungsi dasarnya sesuai landasan hukum,bukan berdasarkan aturan dari kediktatoran politik atau aturan dari golongan elit yang kuat.Mendasarkan sebuah Negara pada suatu system hukum mendorong mudahnya investasi masuk sebab bisnis asing akan mengetahui bahwa kepentingan mereka akan terlindungi.Mengikuti aturan hukum juga memastikan perlindungan hak asasi masyarakat local.

SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

Hukum internasional berasal dari berbagai sumber,yang paling penting adalah perjanjian bilateral dan multilateral antarnegara.Perjanjian(treaty)adalah kesepakatan(agreement)antar Negara atau bias juga di sebut convention,covenant,compact atau protocol.Organisasi internasiona seperti PBB telah menyediakan sebuah forum untuk menciptakan banyak perjanjian.PBB telah mensponsori banyak konsferensi yang telah melahirkan kesepakatan antarnegara dalam permasalahan hyang beragam,termasuk pengiriman POS dan penggunaan SIM di Negara lain.Selain itu,mahkamah internasional,salahsatu organisasi PBB menciptakan hukum internasional saat memutuskan penyelesaian konflik yang terjadi di Negara-negara anggotanya.

Sumber lain hukum internasional adalah hukum adat internasional,yang terdiri dari hukum internasional yang bersala dari adat dan penggunaan selama berabad-abad.Salahsatu contoh hukum internasional adat adalah pelanggaran terhadap genosida(adapula undang-undang internasional yang melarang genosida).

EKSTRATERITORIALITAS

Dari beberapa Negara yang menerapkan hukumnya di luar batas Negara mereka.Hal ini disebut juga penerapan hukum ekstrateritorial(di luar batas wilayah)Usaha penerapan hukum di luar negeri bukan karena paksaan akan tetapi melalui cara-cara hukum tradisional.

Kekuatan Hukum Nasional di Beberapa Negara

1. Lingkungan Hidup

a. Perbedaan dalam Sistem Hukum

b. Hukum yang Berorientasi Ke dalam Negeri

c. Hukum langsung mempengaruhi Transaksi bisnis

d. Hukum yang ditujukan ke Perusahaan –perusahaan Asing

e. Dampak perusahaan Multinasional terhadap Negara Tujuan

f. Penyelesaian Sengketa dalam Bisnis Internasional

2. Lingkungan Teknologi

3. Lingkungan politik

Perpajakan

Ada beberapa jenis pajak :

1. Pajak atas laba modal.
2. Bentuk perpajakan lainnya yaitu “unitary tax system” ( sistem perpajakn berdasarkan kesatuan atau kelompok)

Kontrak Bisnis

Kontrak bisnis internasional, dapat disebabkan karena sebelumnya tidak mengenal model tersebut, dapat juga karena posisi tawar (bargaining position) yang lemah. Oleh karena itu tidak mengherankan, perjanjian patungan (joint vventure), perjanjian waralaba (franchise), perjanjian lihsensi (license), perjanjian keagenan (agence), memiliki formal dan substansi yang hampir sama diberbagai negara.

Paten, Merek dagang , Nama dagang, Hak Cipta, dan Rahasia Dagang kekayaan Intelektual (property Right)

* Paten adalah suatu hak yang diberikan oleh pemerintah kepada penemu sesuatu produk atau proses untuk memprabikasi, mengeksploitasi, menggunakan dan menjual penemuan atau proses tersebut.
* Merek dagang dan nama dagang adalah rancangan dan nama suatu produk yang digunakan oleh para pedagang atau pabrikan dan biasanya terdaftar secara resmi.
* Hak cipta adalah hak yang sah yang biasanya diberikan kepada penulis, komposer, kreator perangkat lunak. Artis dan penerbit untuk mempublikasikan dan menjual karya mereka.
* Rahasia dagang adalah informasi tentang bisnis yang dirahasiakan . semua hak tersebut adalah kekayaan intelektual.

LINGKUNGAN TEKNOLOGI

Dimensi penting lainnya suatu negara adalah lingkungan teknologinya. Fondasi lingkungan teknologi suatu negara adalah basis sumber dayanya. Beberapa negara, seperti australia, argentina, dan thailand diberkati dengan banyak tanah pertanian yang subur. Negara-negara lainnya, seperti arab saudi, afrika selatan, dan russia diberkati dengan sumber daya alam yang kaya seperti minyak, emas, dan berlian. Negara-negara seperti cina dan indonesia mempunyai pasokan tenaga kerja yang melimpah, sedangkan negara-negara lainnya seperti islandia dan selandia baru, tidak memilikinya. Ketersediaan atau ketidaktersediaan sumber daya mempengaruhi produk-produk mana dibuat dinegara tertentu.

Negara dapat mengubah atau membentuk lingkungan teknologinya melalui investasi. Banyak negara, seperti kanada, jerman dan jepang, telah berinvestasi besar-besaran dalam infrastrukturnya jalan bebas hambatan, sistem komunikasi, pengairan, dan seterusnya untuk lebih memudahkan produksi dan pendistribusian produk-produk. Sama halnya, banyak negara telah berinvestasi besar-besaran dalam modal manusia.

Sarana lain untuk mengubah lingkungan teknologi suatu negara adalah ahli teknologi, yaitu pemindahan teknologi dari satu negara ke negara lain. Beberapa negara telah mendukung ahli teknologi dengan mendorong penanaman modal asing (PMA).

Faktor penentu penting lingkungan teknologi suatu negara dan kemauan perusahaan-perusahaan asing mengalihkan teknologi kepada negara tersebut adalah tingkat perlindungan yang ditawarkan undang-undangnya bagi hak kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual-paten, hak cipta, merek dagang, nama merek, dan seterusnya merupakan suatu aset penting sebagian besar perusahaan multinasional.

LINGKUNGAN POLITIK

Bagian penting setiap keputusan bisnis adalah menilai lingkungan politik dimana suatu perusahaan menjalankan usaha. Peraturan perundang-undangan yang disahkan disetiap tingkat pemerintah dapat mempengaruhi kelangsungan hidup pengoperasian suatu perusahaan di negara tujuan tersebut. Undang-undang upah minimum mempengaruhi biaya yang harus dibayar suatu untuk tenaga kerja; peraturan penentuan wilayah mempengaruhi cara perusahaan tersebut dapat menggunakan harta miliknya; dan undang-undang perlindungan lingkungan mempengaruhi teknologi produksi yang dapat digunakan perusahaan tersebut dan juga biaya pembuangan bahan limbahnya.

* Risiko Politik

Kebanyakan perusahaan merasa nyaman menilai iklim politik dinegaranya sendiri. Namun, menilai iklim politik dinegara-negara lain adalah sesuatu yang jauh lebih bermasalah. Bisnis-bisnis internasional yang berpengalaman terjun dalam penilaian risiko politik (political risk assesment), suatu analisis sistematis tentang risiko-risiko politik yang dihadapinya dinegara-negara asing. Risiko politik adalah perubahan-perubahan dalam lingkungan yang mungkin akan membawa pengaruh yang merugikan terhadap nilai kegiatan-kegiatan bisnis suatu perusahaan.  
Risiko politik dapat menimpa semua perusahaan dengan sama rata atau hanya difokuskan pada beberapa perusahaan tertentu. Risiko mikropolitik mempengaruhi semua perusahaan disuatu negara. Risiko mikropolitik hanya menimpa suatu atau beberapa perusahaan tertentu dalam suatu industri tertentu. Nasionalisasi arab saudi atas industri minyaknya pada tahun 1970-an adalah suatu contoh risiko mikropolitik yang ditimpakan pemerintah.

* Kebanyakan perusahaan multinasional terus-menerus memonitor negara-negara yang merupakan tempat mereka menjalankan bisnis untuk mengetahui perubahan-perubahan dalam resiko politik. Sering sumber informasi terbaik adalah karyawan. Apakah mereka adalah warga dari negara asal atau negara tujuan, karyawan mempunyai pengetahuan langsung tentang lingkungan politik dan merupakan sumber informasi risiko politik yang bernilai.

[**KEKUATAN POLITIK**](https://www.blogger.com/null)

Ada beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan dalam dunia bisnis, seperti kondisi politik, sumber alam dan cuaca di negara bersangkutan, selain itu perlu juga diperhatikan stabilitas dan hasrat pemerintah dalam mendorong pertumbuhan investasi, juga perkiraan geografis dan sumber alam. Banyak kekuatan politik yang harus dihadapi bisnis,mempunyai sumber-sumber ideologi dan ada banyak lagi sumber-sumber lain. Hal ini meliputi masalah nasionalisme, terorisme, budaya, tingkat stabilitas pemerintah, hubungan dengan organisasi internasional dan badan usaha milik negara.

Elemen lingkungan politik yang relevan adalah peranan pemerintah dalam perekonomian , ideologi ekonomi dan politik, hubungan internasional, dan hubungan antara pemerintah dan bisnis pada umumnya. Para ahli politik biasanya melihat pada variabel lainya karena mereka berminat terhadap perilaku politik dan organisasi menurut pengertian harfiahnya, bukannya bagaimana kaitan semua faktor itu dengan kegiatan bisnis.Lingkungan politik telah diakui sebagai faktor penting dalam banyak keputusan bisnis internasional.Studi menunjukkan bahawa nasionalisme dan perundangan dengan pemerintah dianggap sebagai masalah pokok bagi manajemen internasional. Selanjutnya, Hendrick dan Struggles memperkirakan bahwa lebih dari 60% perusahaan Amerika Serikat yang melakukan bisnis di luar negeri mengalami kerugian akibat politik dalam periode 1975 sampai 1980.

**[PERANAN PEMERINTAH DALAM BISNIS.](https://www.blogger.com/null)**

            Ada dua peran pemerintah jika dilihat dari sisi bisnis yaitu sebagai *“Pemeran”* dan sebagai *“Pengatur”.* Kedua peran tersebut dilakuakn oleh setiap pemerintah, tentu dengan kadar yang berbeda –beda.

*Pemerintah sebagai Pemeran.*

            Ada beberapa alasan mengapa peran serta pemerintah dalam Kegiatan bisnis perlu diperhatikan oleh pelaku bisnis internasional. *Pertama*, Pemilikan pemerintah mungkin menutup kemungkinan operasi perusahaan  di beberapa pasar (contohnya India). *Kedua*, pemilikan pemerintah dapat berarti satu-satunya pelanggan perusahaan di suatu negara adalah pemerintah negara tersebut (Contohnya di negara komunis dahulu, perusahaan hanya bisa berhubungan dengan perusahaan dagang negara, ini bentunya monopsoni pemerintah ). *Ketiga*, peranannya sebagai sebagai konsumen atau pembeli tunggal terbesar, pemerintah di setiap negara merupakan pembeli terbesar barang dan jasa (contohnya,  di Jepang belanja negara 17% dari PNB, di Amerika Serikat 32%, di Eropa Barat 50%, dan di Swiss 62%). Di negara dimana sektor swastanya sangat lemah, pemerintah merupakan satu-satunya mitra usaha patungan, atau memang peraturan untuk investor asing sengaja dibuat seperti itu. Kerja sama semacam itu merupakan kendala bagi pemasar di negara tersebut, karena elemen terkendali dari bauran pemasaran menjadi kurang terkendali.

*Pemerintah sebagai Pengatur.*

            Pemasar memahami peran pemerintah sebagai pengatur lingkungan bisnis. Pemerintah merencanakan dan mengarahkan, mengenakan pajak dan mengatur perekonomian. Kebijakan moneter dan fiskal mempengaruhi  penetapan harga dan penggunaan kredit oleh pelaku bisnis. Berbagai undang-undang negara yang mempengaruhi berbagai elemen bisnis internasional.

[**KEKUATAN IDEOLOGI**](https://www.blogger.com/null)

*Ideologi Ekonomi dan Politik.*

            Konsep pemasaran dan manajemen pemasaran semula adalah fenomena Amerika, yang juga tumbuh subur di negara lain yang ideology ekonominya mendekati amerika, demokratis dan kapitalis, serta memiliki tradisi Barat (kecuali Jepang). Dari negara semacam itulah berasal sebagaian besar perusahaan internasional. Ini tidak berarti bahwa pemasaran bertententangan dengan dengan masyarakat yang nondemokrasi dan sosialis, atau tidak memiliki tradisi Barat. Pada dasarnya pemasaran tidak mengandung ideology, tapi pemasaran merupakan suatu kegiatan budaya dan sekaligus suatu Kegiatan ekonomi, maka lingkungan ideology budaya dan ekonomi mempengaruhinya. Namun, pemasaran berarti menyesuaikan diri dengan pasar, jadi program pemasaran harus bebas dari ikatan ideology negara asal perusahaan internasinal.

*Kapitalisme, Komunisme,Sosialisme, Liberalisme dan Nasionalisme .*

**Kapitalisme,**merupakan sistem ekonomi dimana alat-alat produksi dan distribusi sebagian besar dimilki dan dioperasikan oleh swasta untuk keuntungan pribadi. Kaum kapitalis beranggapan bahwa idealnya semua faktor produksi adalah milik swasta atau perorangan. Dalam dunia kapitalis pemerintah membatasi fungsinya dan hanya menangani fungsi yang tidak dapat dilaksanakan swasta atau perorangan, misalnya pertahanan nasional, polisi, pemadam kebakaran dan pelayanan umum lainnya serta hubungan antara pemerintah dan dunia internasional.

            Dalam menentukan apakah perusahaan akan beroperasi di negara yang ideologinya bertentangan dengan ideology negara asal perusahaan, di perlukan pertimbangan moral dan pertimbangan peraktis. Namun perlu diingat bahwa pemasaran adalah suatu fungsi ekonomi, bukan alat untuk menyebarkan pandangan hidup Amerika, Eropa atau negara asal lainnya.

            Pertimbangan praktis, perusahaan hanya akan berkepentingan dengan potensi laba jangka panjang, yang pada gilirannya akan tergantung pada:

1. potensi pasar negara tujua
2. kemungkinan sikap menetang dari pemerintah tuan rumah atau negara asal
3. reaksi pelanggan dipasar lain. Misalnya, penjualan kepada negara komunis dapat diancam boikot di dalam negeri, dan hubungan dagang dengan Israel mengandung resiko boikot Arab.

**Komunisme.**Dalam doktrin komunis, pemerintah menekankan agar semua faktor produksi utama dimiliki pemerintah, dengan beberapa pengecualian semua produksi dilakukan oleh pabrik-pabrik dan pertanian milik pemerintah, serikat pekerja juga dikendalikan oleh pemerintah.

*Komunisme* yang dicetuskan oleh *Karl Marx* adalah teori perubahan sosial yang diarahkan kepada cita-cita masyarakat tanpa kelas. Komunis yang dikembangkan oleh*Lenin* dan lain-lainnya melibatkan penguasaan kekuatan melalui partai politik konspirasi, memelihara kekuatan dengan menekan keras oposisi internal dan komitmen untuk mencapai tujuan akhir sebuah negara komunis dunia.

Pengambilalihan negara yang dulunya bukan komunis oleh pemerintah komunis, berdasarkan salah satu doktrin komunis, yaitu seluruh faktor produksi dimiliki pemerintah, maka pemerintah cenderung mengambilalih perusahaan swasta. Hal ini terjadi di Rusia pada tahun 1917 melalui revolusi *Bolskevik*dan juga terjadi setiap komunis berkuasa di negara tersebut.

***Pengambilalihan* (*expropriation*)**, yaitu penyitaan pemerintah atas kekayaan didalam batas negaranya sendiri yang dimiliki orang asing, diikuti dengan kompensasi yang segera, memadai dan efektif yang dibayarkan kepada pemilik sebelumnya (kompensasi kekayaan ekspatriat).

***Penghapusan dan Penyitaan (confiscation)***, hukum internasional yang biasa dikenal adalah hak suatu negara untuk menghapuskan kekayaan orang asing yang ada di dalam wilayah yuridisnya. Hukum tersebut mengharuskan negara yang bersangkutan memberikan ganti rugi kepada pemilik asing dimaksud, jika tidak ada penyelesaian ganti rugi, maka pengambilalihan berubah menjadi penyitaan.

***Kehancuran Komunis.*** Banyak sekali alasan kegagalan komunisme dalam sistem ekonomi maupun kemasyarakatan, hal ini terjadi karena pemerintah mengkonsentrasikan ilmuwan, insinyur, manajer dan bahkan bahan baku terbaik yang dimilikinya untuk keperluan militer serta mengabaikan produksi barang-barang konsumsi.

**Sosialisme,**yaitu kepemilikan oleh masyarakat secara kolektif atas alat-alat produksi dan distribusi dasar, dioperasikan untuk digunakan ketimbang untuk mencari laba.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah sosialis bervariasi dan cenderung tidak konsisten dengan doktrin. Salah satu contoh misalnya Singapura yang menurut bentuknya negara sosialis tetapi dalam kenyataanya adalah kapitalis agresif.

**Liberalisme atau. Konservatif *Konservatif*** adalah orang yang ingin meminimalkan kegiatan pemerintah dan memaksimalkan kepemilikan swasta dan bisnis sayap kanan Posisi konservatif yang lebih ekstrim. Sementara ***Liberal*** merupakan kebalikannya, yaitu seseorang atau kelompok atau pertai yang mendorong partisipasi pemerintah dibidang ekonomi, kepemilikan dan pengaturan usaha. Liberalis hampir mirip dengan sayap kiri, tetapi sayap kiri lebih ekstrim dan lebih dekat kepada sosialisme atau komunisme.

**Nasionalisme**.Nasionalisme adalah pengabdian kepada bangsa, aspirasi atau kepentingan politik dan ekonomi serta tradisi sosial dan  budaya sendiri. Ideologi nasionalisme adalah keyakinan  dikalangan individu  suatu bangsa, bahwa mereka berbeda dan/atau lebih baik dari pada individu bangsa lain. Bentuk nasionalisme yang terhormat disebut *Patriotisme,*sedangkan bentuk nasionalisme yang berlebih-lebihan dinamakan *Chauvinisme*. Dewasa ini, nasionalisme dianggap sebagai kekuatan pembeda yang merintangi kerjasama regional dan internasional. Nasionalisme merupakan fenomena yang tak habis-habisnya disetiap negara, tetapi bentuknya bisa berubah sewaktu-waktu, misalnya jika terjadi pergantian kekuasaan atau perubahan kondisi ekonomi. Pemasar internasional di tantang untuk menyesuaikan diri dengan permintaan nasionalisme local tanpa mengurangi kekuatan internasional perusahaan.

Nasionalisme disebut juga “*secular religious of our time”,*dikebanyakan negara yang lebih dulu berdiri, loyalitas dan kebanggaan pada suatu negara didasarkan pada suku, bahasa, agama atau ideologi. Negara-negara baru umumnya masih memiliki batas antar negara yang masih bersifat sementara akibat penjajahan masa lampau dan negara tersebut pada umumnya memiliki banyak suku dan bahasanya. Hal ini dapat memicu terjadinya perang saudara, seperti yang terjadi di Rwanda, Nigeria dan Angola. Hal ini disebabkan karena pemerintah tidak mampu melaksanakan pembangunan secara baik dan merata dan belum ditanamkannya rasa nasionalisme. Nasionalisme merupakan perasaan yang dapat mengkristal, bahkan karena kuatnya dapat mencegah masuknya orang asing ke negara yang bersangkutan.

Ada beberapa dampak yang dapat ditimbulkan dari rasa nasionalisme terhadap perusahaan internasional, antara lain :

1.   Permintaan lokal terhadap produk perakitan atau pabrikasi sangat minim

2.   Reservasi industri tertentu, khususnya perusahaan lokal

3.   Pemerintah lebih suka menggunakan jasa pemasok lokal

4.   Pambatasan jumlah dan jenis tenaga asing

5.   Proteksi dengan menggunakan tarif, kuota dan lainnya

6.   Mengusahakan “solusi prancis”, daripada pengambialihan asing terhadap perusahaan lokal

7.   Yang paling ekstrim terjadinya pengambilalihan atau penyitaan

**[BUMN, PRIVATISASI DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL.](https://www.blogger.com/null)**

**Badan Usaha Milik Negara (BUMN).**

Kita mungkin berpendapat bahwa kepemilikan pemerintah atas faktor produksi hanya ditemukan di negara-negara komunis atau sosialis, ternyata tidak benar. Justru segmen bisnis besar lebih banyak dikuasai oleh pemerintah yang tidak menganggap dirinya sebagai komunis ataupun sosialis.

***Persaingan tidak sehat,***apabila terjadi persaingan antara perusahaan milik negara dengan perusahaan swasta, biasanya yang menang dan mendapatkan untung adalah perusahaan milik pemerintah tersebut. Hal ini disebabkan oleh :

1.   Perusahaan milik negara dapat menurunkan harga dengan secara tidak wajar, karena tidak berorientasi untuk mencari laba

2.   Perusahaan milik negara dapat memperoleh dana/modal yang murah dan mudah

3.   Perusahaan milik negara memperoleh kontrak kerja dari pemerintah

4.   Perusahaan milik negara memperoleh kemudhan ekspor

5. Perusahaan milik negara mendapat bantuan tenaga dari pemerintah, sehingga mengurangi biaya upah

Selain hal-hal tersebut diatas yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa perusahaan milik negara memperoleh subsidi lansung dari pemerintah, hal ini akan memperparah persaingan yang tidak sehat antara perusahaan tersebut dengan perusahaan swasta.

***Kesulitan kolaborasi pemerintah dan swasta,***kesulitan ini terjadi karena tujuan dan cara operasional keduanya sangat berbeda, perbedaan yang paling mendasar adalah orientasi usaha keduanya, perusahaan swasta lebih memperhitung kan laba usaha mereka, sedangkan perusahaan pemerintah tidak.

***Mengapa perusahaan dinasionalisasi ?,***berbagai alasan yang munkin tumpang-tindih satu sama lainnya mengapa pemerintah menguasai perusahaan, alasan-alasan tersebut antara lain :

1.   Untuk menarik uang, karena perusahaan yang dimaksud diperkirakan memperoleh banyak laba

2.   Mengacu pada alasan pertama, pemerintah yakin mampu mengoperasionalkan perusahaan tersebut dengan lebih efisien dan lebih banyak menghasilkan uang

3.   Untuk tujuan ideologi, khususnya apabila sayap kiri pemerintah memenangkan pemilihan dan bermaksud menasionalisasi perusahaan, seperti yang terjadi di Inggris, Prancis dan Kanada

4.   Untuk memperoleh dukungan suara, karena para politisi beranggapan dapat menyelamatkan PHK tenaga kerja, dengan membantu perusahaan yang sudah hampir runtuh untuk tetap dapat bertahan hidup, dan setelah pemilihan bantuan tersebut akan dihentikan

5.   Karena pemerintah telah menyuntikan dana ke perusahaan atau industri sebagai akibat dari hasil pengawasan

6.   Terjadinya nasionalisasi perusahaan setelah perang, karena sedikit banyak pemerintah merasa perlu melakukan bisnis.

**Privatisasi**

Privatisasi adalah pemindahan aset sektor publik kepada sektor swasta, pemindahan manajemen kegiatan negara melalui kontrak-kontrak dan leasing, dan mengontrakkan kepada pihak luar kegiatan-kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan oleh negara. Perlu diingat bahwa privatisasi tidak selalu berarti pemindahan kepemilikan dari pemerintah kepada pihak swasta, tapi privatisasi dapat juga berupa kontrak dengan swasta untuk kegiatan yang semula dilakukan oleh pemerintah. Atau dapat juga berupa usaha patungan atau kerjasama dalam mengoperasikan usaha yang semula dikelola oleh pemerintah.

Stabilitas dan kesanggupan perbankan untuk membayar utang perlu diperbaiki setelah dilakukan privatisasi perusahaan dagang dan industri. Perusahaan yang telah diprivatisasi telah mampu meningkatkan perolehan laba, sehingga berpengaruh pada perbaikan portofolio pinjaman bank.

***Proteksi Pemerintah.***Berdasarkan fakta sejarah, fungsi pemerintah, apapun ideologiny, pasti melakukan proteksi atas kegiatan ekonomi, pertanian, pertambangan, dan sebagainya yang terdapat dalam wilayah kekuasaannya. Proteksi ini dilakukan bila ada serangan,  kerusakan, perampokan oleh teroris, bandit atau gerakan revolusioner serat penyerbuan dari negara lain.

***Terorisme,***merupakan tindakan kekerasan melawan hukum yang dikatakan untuk bermacam-macam alasan, termasuk untuk menggulingkan pemerintah yang sah, memperoleh pembebasan rekan-rekannya yang dipenjara, pembalasan yang pasti untuk kesalahan-kesalahan yang nyata maupun khayalan, dan menghukum orang-orang yang tidak percaya akan keyakinan (agama) teroris tersebut.

Sejak tahun 1970-an dunia dikejutkan dengan terorisme. Beberapa kelompok telah melakukan pembajakan pesawat, penembakan dan penculikan orang serat pengeboman orang dan benda lainnya. Kelompok teroris tidak suka dengan keteraturan masyarakat, ekonomi dan politik.

*Perubahan terorisme****,***ditinjau dari sisi positifnya, teroris di Eropa Timur dan Uni Soviet misalnya, mereka telah kehilangan apa yang menjadi haknya, seperti pekerjaan dan kesempatan mengikuti pendidikan. Sementara dari sisi negatifnya, beberapa kegiatan teroris telah menghancurkan kejayaan beberapa negara, Soviet misalnya. Kelompok teroris yang dibentuk berdasarkan suku seperti yang terjadi di Eropa, berjuang untuk kepentingan sukunya, termasuk tanah untuk rakyatnya.

Berdasarkan cara kerja, tujuan dan sasaran kegiatannya terorisme antara lain dapat dikelompokan menjadi Terorismeseluruh dunia, Terorisme dengan sponsor pemerintah berdasarkan undang-undang perang, Terorisme berupa penculikan untuk mendapatkan tebusan uang, Terorisme nuklir, Terorisme islam fundamentalis, dan lain-lain.

***Stabilitas Pemerintahan.***Pemerintah dapat dikatakan stabil apabila ia dapat mempertahankan kekuasaannya sendiri dan jika bebijakan fiskal, moneter dan politik dapat diramalkan dan tidak terkena perubahan-perubahan radikal dan tiba-tiba. Stabilitas pemerintah dapat dilakukan melalui dua pendekatan, pertama sekedar memelihara kemampuan untuk tetap dapat memerintah atau yang kedua membuat kebijaksanaan pemerintah yang stabil dan permanen. Dengan terciptanya kestabilan, kebijaksanaan pemerintah atau bila ada perubahan dilakukan secara bertahap, akan dapat meningkatkan dan menstabilkan dunia usaha (kegiatan perdagangan dan keuangan).

***Instabilitas***, pemerintahan yang tidak stabil adalah kebalikan dari yang stabil, pemerintahan yang tidak dapat mempertahankan kekuasaannya sendiri, atau melkukan perubahan kebijaksanaan yang tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi.

***Kebencian Tradisional.***Disini hanya akan diuraikan sedikit tentang kebencian tradisional untuk menggambarkan dampaknya terhadap dunia usaha dan perdagangan internasional. Kebencian tradisional merupakan permusuhan yang telah berlansung lama antara suku, ras, agama, ideologi atau negara.Banyak sekali contoh-contoh kebencian tradisional yang terjadi di seluruh dunia, yang semuanya pasti meperlambat, bahkan menghalangi terjadinya pertumbuhan dan perkembangan kegiatan usaha dan perekonomian dinegara yang mengalaminya, seperti yang terjadi antara negara-negara Arab dengan Israel, Burundi dengan Rwanda (kelompok Hutu dan Tutsi), Kelompok Tamil dan Sinshalese di Srilangka, Kroasia, Bosnia dan Serbia di bekas negara Yugoslavia dan Afrika Selatan.

***Serikat Buruh.***Keberadaan serikat buruh juga memiliki kekuatan politik tersendiri terhadap dunia usaha dan kegiatan perdagangan dan perekonomian dunia. Di beberapa negara serikat buruh berorientasi pada ideologi yang cenderung ke sayap kiri, bahkan ada yang memiliki peran tersendiri dalam kekuatan politik, tidak hanya pada saat pemungutan suara, tapi juga di dewan legislatif. Lobi-lobi yang mereka lakukan pada umumnya untuk menentang peraturan dan perundang-undangan yang dianggap merugikan kepentingan kaumburuh itu sendiri.

Hubungan Internasional.

Walaupun perusahaan internasional hanya berkepentingan dengan pemasarannya, tapi ia perlu memperhatikan politik internasional negara tuan rumah dengan dua alasan yaitu :

1.    Perusahaan internasional dianggap sebagai “orang asing”, walaupun negara tuan rumah berusaha bersikap netral.

2.    Banyak operasi nasional perusahaan internasional berkaitan dengan operasinya di negara lain, baik dari segi pennawaran, permintaan atau kedua-duanya.

Salah satu aspek penting dalam hubungan internasional suatu negara adalah hubungan politik dengan negara asal perusahaan internasional. Bila negara tuan rumah membenci kebijakan politik negara asal perusahaan internasional, maka perusahaan tersebut mungkin mengalami kendala pada negara tersebut. Elemen kritis yang kedua adalah hubungan negara tuan rumah dengan negara lain. Bila negara itu menjadi anggota kelompok regional seperti MEE, atau ASEAN, ini berarti negara tersebut memiliki sahabat atau mungkin juga musuh tertentu. Coca Cola mungkin tidak termasuk daftar hitam Liga Arab, seandainya Coca Cola hanya mengekspor ke Israel dan tidak menjual lisensi di negara – negara anggota Liga Arab. Selain kelompok regional, perusahaan internasional juga dipengaruhi perilaku para anggota pakta meliter semisal NATO, atau keanggotaan dalam GATT, IMF, Bank Dunia dan lainnya.

***Organisasi Internasional***Sebagaimana diketahui, bahwa nasionalisme merupakan kekuatan politik yang sangat kuat dan telah tumbuh pesat pada pertengahan dan akhir abad ke 20. Disamping itu kekuatan politik internasional dengan keberadaan organisasi-organisasi internasional seperti PBB, Bank Dunia, IMF, GATT, WTO, OPEC, Uni Eropa, OECD dan lain-lain telah ikut mempengaruhi dan memiliki kekuatan tersendiri terhadap kegiatan bisnis dan perdagangan dunia.

***Prusahaan Internasional.***Bisnis Internasional tidak hanya semata-mata sebuah korban kekuatan politok yang pasif, tapi sebaliknya ia dapat menjadi sebuah kekuatan yang ampuh dalam arena politik dunia.Uang banyak akan menjadi kekuatan, kekuatan perusahaan internasional bukan hanya pada besar kecilnya uang yang dimilki. Kekuatan tersebut dapat berupa modal, teknologi dan manajemen, serta kemampuan mengelola sumber alam. Perusahaan internasional memiliki kemampuan untuk memproses, memproduksi, mendistribusikan dan memasarkan, sehingga berhasil dalam mengeksplorasi bahan mentah, mempabrikasi, mendistribusi dan memasarkan produk tertentu. Kemampuan seperti ini adakalanya tidak dimilki oleh negara berkembang, karena itu perusahaan internasional dapat berkembang pesat.

***Country Risk Assessment (CRA)*atau Pengaksesan Risiko Negara.** Pengaksesan Risiko Negaraadalah, bank atau bisnis yang memiliki aset atau piutang dari negara asing, atau mempertimbangkan pinjaman atau investasi di sana, mengevaluasi bahwa situasi dan kebijaksanaan ekonomi negara itu serta politiknya untuk menentukan berapa besar risiko yang ada karena kehilangan aset atau tidak dibayar.

Kejadian politik akhir-akhir ini mendorong perusahaan internasional untuk mengembangkan CRA. Perusahaan yang telah menggunakan CRA hendaknya melakukan pembaharuan, sehingga dapat diperoleh CRA yang mutakhir, sedangkan perusahaan yang belum menggunakan disarankan untuk segera menggunakannya.

***Bentuk-bentuk Risiko di suatu Negara,*** risiko yang diakibatkan oleh kegiatan politik di suatu negara biasanya berkembang secara alamiah, antara lain berupa perang, revolusi dan kudeta. Yang terpenting bagi dunia bisnis adalah perubahan yang terjadi dalam pemerintahan. Risiko lainnya adalah masalah ekonomi atau keuangan. Masalah keuangan dapat berupa defisit pada pertimbangan pembayaran atau rata-rata inflasi yang tinggi dan penjadwalan kembali pembayaran utang.

***Muatan Informasi dalam CRA,*** berbagai informasi termasuk yang disajikan dalam CRA perlu dijadikan bahan pertimbangan oleh perusahaan dalam memutuskan tingkat risiko di suatu negara. Selain itu perlu dipertimbangkan juga sifat usaha dari perusahaan, jangka waktu investasi, pinjaman atau hal lainnya yang berkaitan dengan perolehan laba.

Pada umumnya analisa faktor sosial, politik dan ekonomi secara makro maupun mikro dilaksanakan oleh instansi-instansi/lembaga swasta maupun pemerintah, analisa ini memakan waktu yang cukup lama. Pada saat ini sangat ditekankan pentingnya CRA dan memaksimalkan pemanfaatannya untuk kemajuan perusahaan. Dalam melaksanakan analisa ini kadang-kadang dipengaruhi oleh keinginan manajemen puncak. Selain menggunakan CRA hasil perusahaan/instansi maupun lembaga lain, hasil analisa CRA oleh perusahaan sendiri juga perlu diperhatikan dan ditingkatkan kualitasnya.

Pelajaran yang diperoleh dari krisis utang luar negeri, paling tidak ada lima hal yang harus diperhatikan dalam analisa CRA, yaitu :

1.    Negara-negara berkembang sangat menentang hal-hal diluar yang mengejutkan.

2.    Krisis utang pembangunan telah menunjukan bahwa kebijaksanaan ekonomi negara penerima pinjaman dapat berakibat pada kurang mampunya pembayaran hutangnya. Negara-negara yang mengalami krisis berat pada umumnya adalah negara yang kebijaksanaan keuangan dan fiskalnya bersifat meluas.

3.    Perubahan ekonomi yang stabil adalah persyaratan utama bagi negara yang berhutang banyak agar mampu membayar dan mengurangi beban hutangnya.

4.     Pemulihan penyelesaian masalah secara sepotong-sepotong memerlukan biaya tinggi, ketegangan masalah sosial dan politik semakin tinggi dan penyelesaian cenderung dengan melaksanakan pemilihan umum yang demokratis.

5.     Yang perlu diperhatikan untuk para analisis CRA mengenai krisis hutang adalah dampak gelombang globalisasi yang diakibatkan adanya goncangan ekonomi.

**PENUTUP**

Banyak tujuan dan manfaat yang dapat kita peroleh dari bisnis internasional baik untuk masyarakat maupun kehidupan ekonomi negara.Salah satunya adalah Mengenal budaya dalam interaksi bisnis. Interaksi bisnis pada dasarnya adalah interaksi antar manusia sehingga aspek budaya, politik dan sosial tidak akan terlaepas dari masalah bisnis.

Bisnis Internasional dalam perkembangannya memerlukan informasi mengenai budaya, politik dan aspek sosial lainnya yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis. Kekuatan yang mendasari bisnis internasional berorientasi pada manajemen oriented. Orientasi adalah asumsi atau keyakinan, yang seringkali tidak disadari, mengenai sifat dunia ini. Dalam hal ini ada tiga orientasi yang menjadi pedoman dalam bisnis internasional yaitu etnosentris, polisentris, geosentris yang kemudian diperluas menjadi regiosentris.

Bidang kegiatan bisnis internasional meliputi Lingkungan Domestik, termasuk sosio ekonomi, sosio cultural, politik, hokum, pemerintahan, persaingan ,fisik, tenaga kerja, keuangan, teknologi.Dan lingkungan Luar Negeri, termasuk sosio ekonomik, sosio cultural, politik, tenaga kerja, keuangan, teknologi dan lingkungan ekonomi.

Ada beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan dalam dunia bisnis seperti kondisi politik, sumber alam dan cuaca di negara yang bersangkutan. Selain itu, perlu juga diperhatikan stabilitas dan hastrat pemerintah dalam mendorong pertumbuhan investasi, juga perkiraan geografis dan sumber alam.

Banyak kekuatan politik yang harus dihadapi bisnis, mempunyai sumber-sumber ideologi dan ada banyak lagi sumber-sumber lainnya. Hal ini meliputi masalah nasionalisme, terorisme, budaya, tingkat stabilitas pemerintah, hubungan dengan organisasi internasional dan badan usaha milik negara.